

Analysis of Internal Control of Fixed Assets at the Department of Environment and Forestry of Sumedang Regency

Triadi Ramadani¹, Apiatno², Lilis Kartika³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

triadir0198@gmail.com¹, apiatno@stie11april-sumedang.ac.id², imeldakartika38@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received Sept 9, 2019

Revised Sept 25, 2019

Accepted Oct 28, 2019

Keywords:

Internal Control, Fixed Assets

ABSTRACT

This study aims to determine the application of internal control of fixed assets as well as to find out documents and records regarding procedures for control of fixed assets implemented by the Department of Environment and Forestry of Sumedang Regency. This type of research is descriptive and data sources used in this study are primary and secondary data. Descriptive analysis method with a qualitative approach. The results showed that the Department of Environment and Forestry of Sumedang Regency has implemented effective internal control of fixed assets, by carrying out supervision and segregation of duties of each relevant section, starting from procurement, acquisition, utilization, maintenance and depreciation of fixed assets owned by SKPD. This means that if internal control is properly implemented and implemented, it will be able to guarantee the security of organizational assets and their availability are used in accordance with agreed procedures, thus minimizing misuse or violations of fixed assets that may occur



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Triadi Ramadani¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No.19 Sumedang Utara Sumedang
Email: triadir0198@gmail.com¹

1. INTRODUCTION

Reformasi birokrasi di Indonesia diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat mendelegasikan beberapa tugas dan fungsi pemerintahan kepada aparat di daerah dan dengan demikian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan rakyat, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah dengan lebih efektif dan efisien. Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralisasi ke arah paradigma desentralisasi.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menjadi kemudahan bagi setiap pemerintah daerah. Karena setiap pemerintah daerah pasti mempunyai instansi pemerintahan yang mempunyai tanggungjawab atas tugas pemerintahan di bidang tertentu yang mempunyai fungsi sebagai eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan kewenangan tersebut, masih banyak terjadi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh instansi pemerintahan dalam mengelola aset yang dimiliki pemerintah daerah di setiap instansi pemerintahan. dari situlah dibutuhkan suatu sistem untuk mengendalikan aset yaitu Pengendalian Internal. Pengendalian Internal dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan yang dapat memberikan

pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan suatu informasi atas laporan keuangan yang mencerminkan nilai dari suatu aset tetap tersebut.

Menurut bendahara barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika ada aset yang rusak maupun hilang akan langsung diberi tanda pada aset yang rusak dan pada aset yang hilang dilaporkan ke BPKAD Kabupaten Sumedang dan juga Inspektorat Kabupaten Sumedang. Akan tetapi informasi yang dilaporkan tersebut tidak serta merta langsung ditindak oleh pihak pengawas aset daerah dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan dari pihak pengawasan pemerintah daerah kabupaten sumedang.

Aset tetap yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus diletakkan dalam lokasi yang tepat dan terjaga agar tidak terjadi pencurian dan tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan pihak yang terkait secara eksplisit, menurut bendahara barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah terjadi kehilangan pada aset tertentu dan juga kerusakan pada aset tertentu yang membuat adanya kendala dalam oprasional SKPD.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengendalian intern yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang.
2. Untuk menganalisis pengelolaan aset yang dimiliki Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal aset tetap pada Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang.

2. LITERATURE STUDY

2.1. Auditing

Auditing merupakan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Umumnya pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Proses auditing dilakukan oleh auditor, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dan sifatnya independen.

2.2. Sistem Pengendalian intern

Untuk dapat memahami bagaimana sistem pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan kas, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal, tujuan sistem pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal dan komponen pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai.

Menurut Mulyadi (2016:163) “sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” Menurut Carl s. Warren dkk (2017:392), pengendalian internal adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Sedangkan menurut Krismiaji (2010:218), pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

2.3. Aset Dan Jenis-Jenis Aset

Menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011 pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, aset merupakan hak yang bisa dipakai dalam operasional perusahaan. Beberapa benda yang dianggap sebagai aset diantaranya; gedung/ bangunan, mobil, merk dagang, hak paten teknologi, uang kas, dan benda/ barang berharga lainnya.

1. Aset Lancar (Current Asset) Menurut Herispon (2016:13) “Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditunaikan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode satu tahun, Pengertian aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar satu tahun. Aset lancar ini berupa investasi jangka pendek, kas, piutang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima.
2. Aset Tetap (Fixed Asset) Pengertian aset tetap adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan/ difungsikan dalam operasional perusahaan. Aset tetap merupakan bagian penting dari aset yang dimiliki, aset tersebut bukan hanya merupakan sekedar basis material dan kondisi vital yang diperlukan dalam oprasional organisasi. Menurut Carl S. Warren dkk, (2017:486), “aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan

tanah” “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.(jurnal Waode Adriani Hasan, 2017) Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, dan memiliki manfaat yang lebih dari satu tahun. Beberapa aset tetap meliputi; gedung, tanah, investasi jangka panjang.

3. Aset Tak Berwujud (Intangible Asset) Pengertian aset tidak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Beberapa aset tidak berwujud ini diantaranya; merk dagang, waralaba, hak cipta, goodwill, hak paten.
4. Aset Lain Aset lain ini adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

2.4. Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap

Ada tiga jenis pengawasan internal atas aktiva tetap yang dapat dilakukan dalam suatu entitas usaha (Mulyadi, 2010), yaitu:

- A. Pengawasan Administrasi, pengawasan ini meliputi pengawasan sistem dan prosedur penyelenggaraan inventaris serta yang berhubungan dengan masalah teknik dan materi inventarisasi, dengan cara perencanaan pengadaan aset tetap dan penganggaran terlebih dahulu.
- B. Pengawasan Fisik, pengawasan ini meliputi penyesuaian keadaan fisik aktiva tetap di lapangan dengan laporan yang terdapat dalam daftar inventaris.
- C. Pengawasan Penggunaan, pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan telah digunakan sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan efisiensi penggunaannya.

3. METODE

Desain penelitian merupakan penjabaran berbagai variable yang akan diteliti, kemudian membuat pengaruh antara satu variabel kepada variabel lainnya sehingga akan mudah untuk dirumuskan apa yang menjadi masalah penelitian, pemilihan teori, perumusan hipotesis, metode penelitian, instrument penelitian dan teknik analisis data, serta kesimpulan yang diharapkan (Sugiyono 2017:6)

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara menentukan, mengklasifikasikan kemudian dianalisa untuk kemudian di interpretasikan hingga akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor yang terdapat pada objek penelitian di lapangan. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan studi internet.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:232) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat dan idenya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel (Sugiyono, 2016:240). Studi pustaka, peneliti menggunakan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Studi internet, sehubungan dengan keterbatasan sumber dan referensi dari kepustakaan, maka penulis melakukan browsing pada situs-situs terkatit untuk memperoleh tambahan literature atau data relevan lain yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 15) .

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada proyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan kata lain, data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono,

2016:267). Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data adalah valid, reliabel, dan obyektif. Sehingga data harus dicek keabsahannya. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah membercheck. Menurut Sugiyono (2016:268), membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang didapat dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan oleh peneliti dengan berbagai penafsirannya disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut valid dan semakin kredibel. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai dengan cara datang ke pemberi data atau forum diskusi kelompok. Data tersebut bisa ditambah, dikurangi, disepakati, atau ditolak oleh pemberi data. Setelah disepakati, pemberi data akan menandatangani data yang telah disepakati bersama agar lebih otentik dan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan membercheck. Reliabilitas atau dependability berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2016:277).

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Result

Data hasil penelitian diambil setelah melakukan penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang. Hal ini yang menjadikan tolak ukur pada bab ini. Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, maka data yang diambil peneliti yaitu tentang pengendalian internal aset tetap seperti jenis-jenis aset tetap, langkah-langkah perolehan aset tetap dan cara pengendalian internal atas aset tetap. Ketiga data tersebut diambil guna mengetahui apakah pengendalian internal aset tetap Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang itu baik atau tidak baik. Pada gambaran umum objek penelitian menerangkan keadaan bagaimana situasi dan kondisi atau keadaan dari suatu objek yang diteliti oleh peneliti. Seperti yang diketahui bahwa SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik maka untuk membantu dalam menjalankan kegiatannya, SKPD harus memiliki berbagai jenis aset tetap yang secara umum dapat dikelompokkan.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya dalam fungsi teknis, yang dilengkapi dengan berita acara rekonsiliasi barang milik daerah Kabupaten Sumedang pada Dinas Lingkungan Hidup Dan kehutanan.

- Tanah adalah lahan tempat organisasi untuk melakukan kegiatan usaha, misalnya sebagai tempat bangunan, parkir, dan lain-lain. Tanah memiliki umur tidak terbatas, tanah tidak mengalami kerusakan sehingga tidak perlu dilakukan penyusutan. Berbeda dengan hak atas tanah dimana hak atas tanah harus disusutkan karena hak atas tanah memiliki masa pakai. Setelah melakukan penelitian ada 15 lokasi tanah yang dimiliki dinas DLHK kabupaten Sumedang dengan kondisi yang baik.
- Mesin adalah aset tetap organisasi berupa benda bermesin yang digunakan untuk menjalankan operasi organisasi yang digunakan untuk kelancaran usaha sehari-hari. Ada beberapa benda bermesin di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Sumedang seperti berikut.
 - a. Buldozer + Wheall lader ada 2 unit dengan kondisi baik.
 - b. Dump Truck ada 18 unit dengan kondisi 15 unit baik, 3 unit rusak berat dan juga dalam proses penghapusan.
 - c. Kendaraan Jabatan berjumlah 7 unit yang diantaranya 6 unit dengan kondisi baik sedangkan 1 unit dengan kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan.
 - d. Kendaraan Operasional berjumlah 6 unit dan dengan kondisi baik untuk digunakan.
 - e. Kendaraan Roda Tiga yang berjumlah 28 unit dengan kondisi baik 15 unit dan sisinya sebanyak 13 unit di pinjam pakai kan di kecamatan dan kelurahan di kabupaten Sumedang.
 - f. Container yang berjumlah 36 unit dan dengan kondisi baik.
 - g. Sepeda Motor (Roda Dua) yang berjumlah 48 unit dengan kondisi baik berjumlah 41 unit sedangkan dengan kondisi rusak berat dan juga dalam proses penghapusan berjumlah 7 unit.
- Bangunan/gedung adalah harta yang dimiliki organisasi biasanya digunakan sebagai tempat kantor, emplasment, dan lain-lain. . Setelah peneliti melakukan penelitian ada 60 unit bangunan dengan kondisi baik berjumlah 57 Unit Bangunan dan kondisi rusak berat ada 3 bangunan.
- Peralatan kantor adalah harta organisasi yang meliputi alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam operasi SKPD meliputi alat-alat peralatan brankas, meja, kursi, AC, mesin TIK, mesin fax, printer, komputer, mesin photocopy, calculator, telepon, dan berbagai peralatan lainnya.
 1. PC Unit/ komputer PC yang berjumlah 45 unit, dengan kondisi baik berjumlah 25 unit dan kondisi rusak berat berjumlah 20 unit.

2. Global Positioning system (GPS) yang berjumlah 25, dengan kondisi baik berjumlah 16 dan dalam kondisi rusak berat berjumlah 9 unit.
 3. Lap Top yang berjumlah 25 unit dengan kondisi baik 10 unit sedangkan kondisi rusak nya berjumlah 15 unit.
 4. Note Book yang berjumlah 18 unit dengan kondisi baik berjumlah 15 unit dan kondisi rusak berat nya 3 unit.
 5. Filling besi/metal yang berjumlah 25 dengan kondisi baik hanya 5 unit dan sisanya sebanyak 20 unit dengan kondisi rusak berat.
 6. Lemari kayu yang berjumlah 28 unit dengan kondisi baik 9 unit dan kondisi rusak berat berjumlah 19 unit.
 7. Meja Kerja yang berjumlah 261 unit dengan kondisi baik berjumlah 159 unit dan kondisi rusak berat berjumlah 102 unit.
 8. kursi Kerja yang berjumlah 627 dengan kondisi baik berjumlah 498 dan kondisi rusak berat 129 unit.
- TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Setelah peneliti melakukan penelitian ada 1 Tempat pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dengan kondisi yang hampir overload.
 - Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Setelah peneliti melakukan penelitian terdapat 5 Tempat Penyimpanan Sampah Sementara/Transfer Depo dengan kondisi 4 tempat sudah tidak memadai.

Adapun tahap pengadaan barang dilakukan seperti berikut :

1. Tahap pertama SKPD menetapkan rencana umum pengadaan dan mengirim rencana umum pengadaan ke LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) untuk diumumkan melalui website.
2. Tahap kedua SKPD Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan Kontrak.
3. Pada tahap ketiga Kepala bagian LPBJ (layanan pengadaan barang dan jasa) menerima paket yang akan dilelangkan, disertai dengan spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan juga HPS (harga perkiraan sendiri).
4. Lalu pada tahap ke empat kelompok kerja yang ada di bagian LPBJ menyusun jadwal pelaksanaan dan metode pelelangan dan juga dokumen pemilihan.
5. Pada tahap kelima kelompok kerja mengumumkan melalui website, Berupa pendaftaran,download dokumen, pelaksanaan pelelangan, dan juga pengumuman pemenang pelelangan melalui website LPSE.
6. Tahap selanjutnya yang ke enam penyedia barang/jasa dapat mengajukan sanggahan terkait pengadaan barang/jasa dan juga tidak mengajukan sanggahan.
7. Jika penyedia barang/jasa tidak ada sanggahan maka tahap selanjutnya kepala bagian LPBJ menyampaikan hasil lelang dilengkapi dengan copy berkas penawaran dan berkas proses lelang.
8. Lalu SKPD menunjuk penyedia barang/jasa dan lanjut tanda tangan kontrak.
9. Jika penyedia barang/jasa mengajukan sanggahan maka penyedia barang/jasa akan mengirim sanggahan ke kelompok kerja LPBJ.
10. Lalu kelompok kerja LPBJ menjawab sanggahan yang dikirim penyedia barang/jasa dan jika proses sanggahan selesai maka tahap selanjutnya akan berujung pada penunjukan penyedia barang/jasa dan lanjut tanda tangan kontrak.
11. Tetapi jika sanggah dimembuahkan hasil atau tidak selesai maka penyedia barang/jasa mengajukan sanggahan banding kepada kelompok kerja LPBJ yang di bantu oleh kepala Daerah jika belum juga selesai maka akan kembali pada proses awal, dan jika sanggahan diterima maka akan lanjut ke proses penunjukan barang/jasa yang berlanjut ke tanda tangan kontrak.

4.2. Discussion

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang melaksanakan dan menerapkan pengendalian internal atas aset tetap . Pengendalian aset tersebut dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, pengendalian intenal yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sudah dijalankan dengan baik. Pimpinan dan para pegawai menjunjung tinggi integritas dan nilai etika, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan yang ditetapkan dengan cara mendapat teguran lisan maupun tulisan. Hal tersebut dapat menekan terjadinya penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Para pegawai juga ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing juga dilakukan pengembangan sumber daya manusia seperti diklat dan pelatihan demi menunjang kinerja pegawai. Pemisahan fungsi tugas kerja juga jelas sehingga para pegawai bekerja dan ditempatkan di bagian yang sesuai dengan latar belakang pengalaman dan pendidikannya.
2. Tujuan dan rencana strategi pemerintah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai agar pada penerapannya didukung oleh sumber daya yang cukup dan melibatkan seluruh tingkat pejabat yang ada. Analisis risiko dilakukan dengan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko maupun faktor-faktor lain yang dapat

meningkatkan risiko, sehingga penerapan faktor-faktor risiko dilakukan agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengendalian internal Aset Tetap maupun dalam pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang secara menyeluruh.

3. Aktivitas pengendalian sangat penting untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan SKPD dan menghadapi risiko telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian terhadap Aset tetap SKPD telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas tiap bidang yang berbeda. Dalam proses penyusunan laporan keuangannya pun terdapat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berbeda demi meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Kinerja para pegawainya juga dinilai secara berkala demi mencapai visi dan misi SKPD.
4. Informasi dan komunikasi yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dengan baik dimana informasi tentang tujuan SKPD dikomunikasikan dengan baik dari atasan hingga bawahannya sehingga informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu agar dapat dilaksanakan pemantauan maupun kegiatan pencegahan dari risiko yang dapat ditimbulkan dari kinerja para pegawai terhadap Aset tetap yang dimiliki SKPD
5. Pengawasan atau pemantauan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan Aset Tetap yang dimiliki SKPD. Pemimpin SKPD sangat menyadari hal itu, maka dilakukannya pemantauan secara rutin dan berkelanjutan sehingga kesalahan dapat dideteksi sejak dini sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap Aset Tetap yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dengan baik.

Secara teoritis, untuk dapat memahami bagaimana pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan Aset Tetap, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri, menurut Krismiaji (2010:218), pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Menjaga Aset organisasi adalah cara yang tepat karena Aset dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Demikian juga untuk aset yang tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk untuk mencegah ataupun menemukan aset yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. Begitu pula dengan aset tetap yang dimana sangat berperan penting dalam suatu organisasi.

Menurut Carl S. Warren dkk, (2017:486), “aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah” “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.(jurnal Waode Adriani Hasan, 2017). Suatu organisasi yang menjalankan fungsinya membutuhkan pengendalian internal yang dapat mengamankan aset organisasi, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal juga dapat membantu dalam pengelolaan aset daerah yang dipegang oleh instansi pemerintahan, karena tiap instansi pemerintahan akan berusaha untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal aset tetap sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi. Karena dengan pengendalian internal aset tetap maka tujuan dan operasional organisasi dapat dilakukan dengan baik, dimana pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap keamanan aset tetap dari segala risiko.

6. CONCLUSION

Berdasarkan penelitian Analisis pengendalian internal aset tetap yang telah dilakukan berdasarkan hasil teoritis dan empiris, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Pengendalian intern pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sudah efektif terlihat dari beberapa indikator seperti Lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi komunikasi, dan pengawasan yang telah di laksanakan dengan baik oleh para pegawai yang bersangkutan dengan mengamankan aset dari penempatan aset yang tidak sah.
2. Dalam pengelolaan aset tetap yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik terlihat dari kondisi aset tetap yang 70% dalam keadaan baik dengan melakukan pengecekan yang rutin.
3. Pengendalian internal aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sudah baik dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa pengendalian internal dan juga pengelolaan aset tetap sudah saling terikat dan menjadikan pengendalian internal aset tetap berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian ini merekomendasikan sebagai sumbangan pemikiran, penulis menyarankan hal-hali sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya, khususnya yang berkeinginan meneliti analisis pengendalian internal aset tetap disarankan agar melakukan penelitian lanjutan pada suatu pemerintahan daerah dengan SKPD yang lebih dari satu SKPD
2. Untuk data yang ditambah peneliti selanjutnya, menganalisa Sistem Informasi Akuntansi juga, bukan hanya pengendalian internal berikut juga dilengkapi dengan data seperti Neraca akuntansi, rekapitulasi barang ke neraca, rekapitulasi kartu inventaris barang, rincian mutasi aset tetap, dan juga daftar realisasi belanja modal.
3. Untuk Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Prosedur pengendalian internal atas aset tetap sebaiknya diterapkan secara keseluruhan termasuk pemantauan, perlu memperbaiki pengendalian secara khusus terhadap aset tetap supaya aset tetap selalu terkordinir terhadap penggunaannya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam kesempatan ini kami haturkan terima kasih atas kepercayaannya untuk melakukan penelitian ini semoga bermanfaat dan dijadikan landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, terima kasih juga kami sampaikan untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang beserta jajarannya, Ketua YPSA beserta jajarannya, Ketua STIE Sebelas April Sumedang beserta civitas akademika atas sumbang saran dan dukungan finansialnya sehingga penelitian ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

REFERENSE

- Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf, 2017 . *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Niswonger, Warren, Reeve, Fess, 2017. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sukrisno Agoes, 2016. *Auditing 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Sumedang nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Layanan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang
- Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Hutapea, Kristian Jakob Hamonangan 2018, tentang Sistem Pengendalian Internal Aktiva Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Medan.
- Lani Rosalina Fernandes, Nyimas Artina, Christina Yunita. W 2016 tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Pada PT Lingga Djaja Palembang
- Waode Adriani Hasan, 2019. Sistem pengelolaan aset tetap pada sekretariat daerah kabupaten Buton.
- Penelitian yang dilakukan Resmeilina Pasaribu 2018 tentang Analisis Penerapan Pengendalian Internal Atas Aset Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
- Thessa Putri Anzani Indra 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 2 Febuari 2020 pada pukul 20:37 WIB
- <https://materibelajar.co.id> diakses pada tanggal 6 febuari 2020 pada pukul 17:12 WIB
- <https://pengertiandefinisi.com>, diakses pada tanggal 10 Febuari 2020 pada pukul 22:18 WIB
- <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada tanggal 23 maret 2020 pada pukul 15:30 WIB
- <https://www.maxmanroe.com> diakses pada tanggal 23 maret 2020 pada pukul 16:22 WIB
- <https://dlhk.sumedangkab.go.id> diakses pada tanggal 27 mei 2020 pada pukul 19:32 WIB
- <https://jdih.sumedangKab.go.id> diakses pada tanggal 27 mei 2020 pada pukul 20:16 WIB

